

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang penuh dengan keberagaman. Ini dibuktikan oleh komposisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ras, suku bangsa, budaya, kepercayaan, dan agama. Hal ini adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Setiap masing-masingnya memiliki karakteristik dan cara hidup yang berbeda-beda di dalam kehidupan masyarakat. Dari cara dan tujuan hidup yang berbeda-beda, maka setiap kelompok maupun individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Jika ditinjau dari semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, hal ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia dengan kekayaan ras, suku bangsa, budaya, dan agama yang berbeda-beda, bangsa Indonesia mempunyai sebuah keyakinan berbagai macam perbedaan tersebut dapat menuju sebuah persatuan yang kuat,

Namun segala keanekaragaman tersebut tidak selalu menghasilkan sebuah keharmonisan. Banyak yang meyakini bahwa keanekaragaman tersebut sebagai sebuah faktor permasalahan baru bagi bangsa Indonesia. Salah satunya menyebabkan konflik horizontal di beberapa daerah di Indonesia seperti di Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Papua, dan lain-lain. Konflik yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat diakibatkan karena adanya kesenjangan perlakuan aparat birokrasi dan hukum terhadap suku asli Dayak dan suku Madura yang menimbulkan kekecewaan yang mendalam.¹Akhirnya, perasaaan ini meluap dalam bentuk konflik horizontal. Masyarakat Dayak terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan yang serba diskriminatif. Sementara penegakan hukum terhadap salah satu kelompok tidak berjalan dengan semestinya. Sedangkan di Poso, Sulawesi Tengah konflik bernuansa SARA berawal pada tanggal 24 desember 1998 yang

¹ Parsudi Suparlan. *Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikultural*. (YPKIK, 2008).

dipicu oleh konflik antara pemuda Kristen yang mabuk dengan pemuda Islam di terminal bus Kota Poso. Perkelahian ini menyebabkan terbakarnya sebuah pemukiman orang Pamona di Kelurahan Lambogia. Selanjutnya, pemukiman Kristen melakukan sebuah aksi balasan.

Dari dua kasus di atas membuktikan perbedaan dapat memicu konflik-konflik sosial didalam masyarakat. Perbedaan dan keanekaragaman yang tidak disikapi dengan dewasa terbukti dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi banyak orang. Oleh karena itu, keanekaragaman benar-benar perlu diperhatikan. Dari berbagai media menyebutkan bahwa konflik dan perpecahan antar golongan merupakan masalah klasik yang terjadi di hampir diseluruh Negara di dunia. Bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang mempunyai keanekaragaman yang diikat oleh pondasi nilai Bhinneka Tunggal Ika, dituntut mampu mengelola keragaman atau pluralitas tersebut secara baik dan bijak. Pengelolaan keanekaragaman secara tepat, adaah kondisi yang bisa memberikan kontribusi kondusif bagi usaha memperkokoh dan memperkuat semangat persatuan dan kebangsaan dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika, khususnya dalam semangat dan usaha membangun bangsa guna mewujudkan sebuah kehidupan yang damai.

Kebudayaan hanya mungkin tumbuh jika seluruh komponen masyarakat memberikan ruang dan fasilitas untuk menumbuh kembangkan kebudayaan tersebut. Selain itu, kebudayaan juga akan tumbuh sehat jika sejalan dengan karakter masyarakatnya yang khas, yang tidak seragam disetiap kelompok. Dengan karakter, lingkungan alam dan kebudayaan yang khas dimasing-masing kelompok masyarakat akan melahirkan keanekaragaman kebudayaan yang berbeda, unik, dan menarik.

Keanekaragaman budaya ini dapat mewujudkan sebuah masyarakat prural apabila warganya dapat hidup berdampingan, toleran, dan saling menghargai. Nilai budaya tersebut bukan hanya sebuah wacana, tetapi harus menjadi sebuah patokan penilaian atau pedoman etika dan moral dalam bertindak yang benar dan pantas bagi orang Indonesia. Nilai tersebut harus dijadikan acuan bertindak, baik

dalam bidang sosial, politik, ekonomi maupun dalam tindakan individual. Keragaman diharapkan menjadi dasar penyatu bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia memiliki keragaman etnis dengan pola tradisi dan idealisme yang berbeda-beda sehingga berpotensi menjadi ancaman keutuhan bangsa.

Indonesia adalah salah satu negara prural terbesar di dunia yang memiliki ratusan suku bangsa. Sebagian diantaranya menjadi penduduk terbesar yang mendiami wilayah lebih dari satu provinsi, seperti etnik Jawa, namun ada juga etnik yang hanya mendiami beberapa desa atau kecamatan saja. Mereka memiliki simbol-simbol dan menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula. Pluralisme pada tujuannya tidak sebatas menghendaki rasa hormat dan toleran, tetapi juga mengakui atas keberbedaan, menghormati atas kenyataan perbedaan. Untuk itu, sudah seharusnya diakui dengan jujur bahwa masyarakat Indonesia memang berbeda-beda dan karenanya segala perbedaan itu untuk dihormati. Sikap seperti ini dapat dilakukan maka ketegangan yang berujung pada konflik dapat dihilangkan. Konflik terjadi karena emosi berlebihan yang disebabkan oleh pemahaman tentang keberbedaan yang sempit dan dangkal, hal ini mengakibatkan timbulnya sentimen terhadap keberbedaan akan berkadar tinggi, sehingga terjadi pemaksaan keinginan antara satu dengan bagian lainnya, dan masing-masing ingin mendapatkan lebih dari yang seharusnya didapatkan. Oleh karena itu, perlu upaya penyadara oleh masyarakat, terutama di daerah konflik ini bahwa mereka hidup diantara berbagai macam budaya yang berbeda didalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu daerah yang memiliki tingkat multikulturalisme dan pruralisme adalah Tuban, Jawa Timur. Tuban adalah sebuah Kabupaten disebelah pojok barat provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Luas kabupaten Tuban sekitar 1.907.70 Km persegi dengan dua puluh kecamatan yang tersebar di dalamnya. Tuban terkenal dengan julukan kota Wali tetapi di lain sisi Tuban juga memiliki julukan yang sangat bersebrangan dengan julukan sebelumnya yaitu kota tuak. Tuak adalah sebuah minuman beralkohol yang didapatkan dari sari pohon Siwalan yang difermentasikan. Dari hal ini sudah

sedikit terlihat kota Tuban memiliki tingkat multicultural dan prulalitas yang cukup tinggi dimana tuban terkenal dengan bumi walinya yang penuh dengan nuansa islami tetapi disisi lain ia terkenal sebagai kota tuak yaitu sebuah minuman yang mengandng alkhohol.

Sejarah Kabupaten Tuban juga membuktikan bahwa Tuban memiliki spectrum budaya yang beragam. Di masa Majapahit kabupaten Tuban menjadi pelabuhan terbesar dimana latar belakang agama kerajaan majapahit adalah Hindu-Budha. Pasca kerajaan Majapahit kabupaten Tuban menjadi salah satu pusat penyebaran agama Isalam yang dilakukan oleh Walisongo khususnya Sunan Bonang beberapa fakta ini membuktikan bahwa masyarakat Tuban sejak dahulu kala sangat menghargai perbedaan dan mampu munumbuhan sifat toleransi. Tuban juga menjadi pintu gerbang masuknya etnis Tionghoa di Indonesia dengan salah satu bukti Panglima besar Cheng Ho pertama kali berlabuh dikawasan pantai Tuban pada masa kerajaan Majapahit.

Pada saat ini masyarakat Tuban masih bisa menjaga pluralisme dan keharmonisan keadaan masyarakatnya. Terbukti dengan kondisi sosial masyarakat Tuban yang mayoritasnya beragama Islam dapat menerima kehadiran kaum Tionghoa dimana masih menjadi kaum minoritas di Indonesia. Masyarakat Tuban sangat menghargai keberagaman ini, terbukti dimana kaum Tionghoa yang menjadi minoritas mendapatkan ruang yang bebas dalam melaksanakan kegiatan ibadahnya. Terbukti dengan adanya dua tempat ibadah agama Konghucu di Kabupaten Tuban. Yaitu klenteng Kwan sing Bio yang terletak di jalan R.E. Martadinata no 1 Karang Sari kecamatan Tuban dan Klenteng Tjoe Ling Kiong yang terletak di jalan Panglima Sudirman no 104 Kutorejo Kecamatan Tuban.² Salah satu Klenteng tersebut memiliki keistimewaan yaitu Klenteng Kwan Sing Bio dimana didalamnya terdapat sebuah patung Dewa Perang Kwan Sing Tee Koen yang terbesar di Asia Tenggara. Ide pembangunan patung ini digagas oleh

² Klenteng Kwan Sing Bio Tuban <http://www.laurentiadewi.com/2017/08/09/klenteng-kwan-sing-bio-klenteng-tuban-tuban-keramat/> Diakses pada 19.00 2 Mei 2018

salah satu pengurus yayasan Kwan Sing Bio yang didanai donatur asal Surabaya yang tidak mau disebutkan namanya.

Kwan Sing Tee Koen adalah simbol perwujudan SHEN MING agama Khonghucu dengan bukti Sejarah seorang tokoh yang menjunjung tinggi ZHONG/Satya dan YI/Kebenaran. Beliau berani berkorban untuk menegakkan Yi (Kebenaran).³ Kebenaran harus diperjuangkan khususnya di Negara Indonesia agar supaya terciptanya keadilan sosial. Jikalau umat Khonghucu bisa mentauladani Kwan Sing Tee Koen maka akan menjadi warga negara yang cinta tanah air khususnya Indonesia. Kwan Sing Tee Koen adalah seorang suci (shenming) yang dimuliakan sejak zaman San Guo 220- 265 Masehi. Versi lain bahwa era San Guo itu dimulai sejak terjadi pemberontakan destar kuning pimpinan Zhang Jiao pada tahun 184. Jadi sebelum bangsa China ada, Kwan Sing Tee Koen sudah ada lebih dahulu sehingga kalau kita bicara Patung Kwan Sing Tee Koen tidak ada hubungannya dengan bangsa China, melainkan berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan bahkan agama Khonghucu. Sangat tidak adil mengkaitkan Patung Kwan Sing Tee Koen dengan nasionalis bangsa Indonesia bahkan membandingkan dengan patung Jendral Sudirman. Umat Khonghucu sangat menghormati Jendral Sudirman sebagai Pahlawan Nasional. Pembuatan Patung Kwan Sing Tee Koen bukan untuk dibandingkan dengan Patung Jendral Sudirman (jangan dipolitisasi). Apalagi pembangunan patung tersebut di belakang halaman Kelenteng yang sangat jauh dari jalan raya. Mengingat bahwa Patung Kwan Sing Tee Koen dimana tangan kiri memegang Kitab CHUN QIU JING (adalah Kitab yang diwahyukan Tuhan langsung oleh Nabi Khongcu). Sementara ada pedang panjang yang memiliki arti bahwa harus menerapkan keadilan berdasarkan kebenaran. Guan Gong/Kwan Sing Tee Koen dipuja diseluruh dunia. Bahkan di Indonesia kebanyakan gambar Kwan Sing Tee Koen digunakan untuk pengambilan sumpah jabatan, sumpah saksi dalam pengadilan negeri.

³ Kwan Sing Tee Koen bukan jendral china <http://www.spocjournal.com/sejarah-history/662-guan-gong-kwan-sing-tee-koen-bukan-jendral-china.html> Diakses pada 22.00 2 Mei 2018

Pembangunan Patung Kwan Sing Tee Koen ini sebenarnya memiliki berbagai macam dampak positif bagi masyarakat Tuban, tidak terkecuali umat Khonghucu saja tetapi juga umat lainnya yang hidup disekitar Klenteng Kwan Sing Bio. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata.

Tetapi setelah Patung ini selesai dibangun muncul beberapa polemik dimasyarakat terkait adanya patung tersebut. Uniknya polemik ini terjadi di luar Kabupaten Tuban. Beberapa komponen masyarakat dan organisasi masyarakat menolak adanya patung tersebut. Bahkan ada yang menuntut untuk merubuhkan patung Dewa Kwan Sing Tee Koen. Masyarakat dan golongan yang menolak keberadaan patung tersebut berasumsi bahwa patung tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah Indoneia⁴. Beberapa kelompok masyarakat tersebut juga mengkait-kaitkan keberadaan Patung Kwang Sing Tee Koen dengan Patung Jendral Sudirman yang ukurannya jauh lebih kecil. Mereka beranggapan bahwa Kwan Sing tee Koen adalah panglima perang China tidak selayaknya dibangun sebuah monumen megah dan sangat besar mengalahkan monumen pahlawan asli Indonesia yaitu Patung Jendral Sudirman. Penolakan ini terjadi hingga adanya demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Timur yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat. Penolakan ini berujung penutupan patung Kwan Sing Tee Koen dengan Kain putih yang dilakukan oleh Pemkab Tuban.

Padahal pembangunan tersebut telah berjalan lama dan seharusnya pemerintahan lokal sudah mengetahui akan pembangunan tersebut karena ketika permasalahan ini terjadi patung tersebut sudah selesai dibangun. Secara logika pemerintahan Tuban tidak mungkin tidak mengetahui atas pembangunan tersebut. Tetapi setelah permasalahan ini muncul pemerintahan Tuban sekan cuci tangan dengan proses pembangunan ini, dengan pernyataan ijin membangun bangunan atas patung tersebut belum disetujui oleh pemerintahan Tuban tetapi dalam

⁴Polemik patung raksasa tuban <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/10/08574211/polemik-patung-raksasa-di-tuban-istana-minta-aparat-tak-tunduk-pada-tekanan> diakses 21.00 3 mei 2018

kenyataannya patung tersebut sudah diremiskan oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu Zulkifli Hasan.

Sedangkan masyarakat di dalam Kabupaten Tuban tidak terprovokasi dengan isu yang mencoba dibangun oleh beberapa pihak tersebut. Masyarakat Tuban sama sekali tidak terganggu dengan adanya patung tersebut, bahkan di kalangan para kawula muda Tuban membumikan sebuah tagar #TubanKitaSemua di berbagai *platform* media sosial. Tagar ini adalah suatu upaya untuk menegaskan bahwa Tuban milik kita semua tidak memandang ras, suku, dan agama. Hal ini setidaknya dapat membuktikan bahwa masyarakat Tuban dengan keadaan multikulturalnya dapat mewujudkan masyarakat menjunjung prulalisme dan menghasilkan sebuah keharmonisan didalam kehidupan bermasyarakat.

Di sini masyarakat Tuban terbukti memberikan ruang kepada pihak minoritas, dalam posisi ini adalah umat Khonghucu yang tetap didukung dan diberikan ruang di dalam publik walaupun mendapatkan berbagai macam protes dari perseorangan maupun kelompok diluar wilayah Kabupaten Tuban tetapi di lain sisi ada beberapa hal yang masih belum jelas terkait perencanaan dan perijinan patung tersebut yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Tuban.

Keharmonisan di atas sebenarnya bukanlah satu-satunya contoh, bahwa hidup berdampingan antar umat beragama ini bisa dijumpai di banyak kasus. Misalnya salah satunya di desa Keramas, Kecamatan Blahbatu kabupaten Gianyar menjadi contoh hidup berdampingan antara umat islam dan hindu. Hidup berdampingan yang sudah terbangun sejak lama di masyarakat desa Keramas menimbulkan nilai-nilai lokal antara lain, saling tolong menolong (*metulungan*), kuatnya ikatan persaudaraan dan kekerabatan (*menyabraya*), saling memberikan hantara ketika upacara keagamaan (*ngejot*) dan kerja bakti di desa (*ngayah*).⁵

⁵ <http://deklarasi-sancang.org/lima-contoh-kerukunan-masyarakat/> dikunjungi pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 01.13

Selain itu contoh kerukunan umat beragama juga terjadi di Padang dengan ditandainya adanya pembauran antara kelompok mayoritas dengan minoritas (*malakok*), di mana hal ini sebagai penerimaan masyarakat terhadap anggota baru ke dalam struktur penduduk pribumi (*pasukuan asal*). Di dalam tataran nasional, salah satu organisasi sayap NU, yaitu Banser (Barisan Ansor Serbaguna) juga secara rutin mengawal jalannya natal. Tindakan pengamanan ini dilakukan karena tidak jarang gereja menjadi target pemboman kelompok ekstremis. Hal ini terjadi pada malam natal 24 desember 2000 di Gereja Eben Haezer, kabupaten Mojokerto di mana salah seorang anggota banser, Riyanto harus tewas karena menyelamatkan jemaat gereja dari bom yang diletakkan oleh orang tak dikenal. Seketika Riyanto tewas oleh ledakan bom yang tidak sempat dibawa Riyanto ke tempat yang aman.⁶ Penghayatan terhadap nilai-nilai keberagaman bukan saja monopoli kelompok mayoritas, banyak sekali contoh yang menunjukkan minoritas menaruh perhatian dan kepedulian atas aktivitas ibadah umat islam di Indonesia. pada tahun 2017 (idul fitri) dan 2019 (idul adha) bertepatan dengan hari minggu yang secara rutin telah menjadi ibadah misa bagi pemeluk umat kristiani. Demi kelancaran dan kenyamanan aktivitas ibadah shola tied umat muslim, pihak Gereja Katedral berinisiatif mengubah jadwal misa. Tidak hanya sampai di situ, pengurus gereja juga mempersilahkan para jamaah sholat ied untuk menggunakan area gereja katedral sebagai lahan parkir.⁷

Dari contoh di atas peneliti ingin menunjukkan bahwa keharmonisan antar umat beragama banyak bentuk dan ekspresinya. Dengan menjadikan pembangunan Dewa Kwan Sing Tee Koen, peneliti ingin melihat lebih jauh persepsi mengenai nilai-nilai multikulturalisme di Tuban, khususnya antara umat Khonghucu dengan masyarakat Non-Khonghucu. Selain itu juga peneliti tertarik untuk menggambarkan bagaimana pengakuan atas nilai-nilai keberagaman dihayati oleh kedua belah pihak.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191224133324-20-459607/antara-gus-dur-riyanto-banser-dan-bom-natal-mojokerto> dikunjungi pada tanggal 21 Mei 01.23

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805114508-20-418428/gereja-katedral-ubah-jadwal-misa-mingguan-saat-idul-adha> dikunjungi pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 01.30

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana persepsi umat khonghucu mengenai multikulturalisme dalam pembangunan Dewa Kwan Sing Tee Koen?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Tuban non khonghucu dalam pembangunan patung Dewa Kwan Sing Tee Koen
3. Bagaimana implementasi gagasan ko-eksistensi dan pro-eksistensi antara umat Khonghucu dan Non-Khonghucu dalam keharmonisan antar umat bergama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana persepsi umat khonghucu mengenai multikulturalise dalam pembangunan patung Dewa Kwan Sing Tee Koen di Kabupaten Tuban.
2. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana persepsi masyarakat Tuban non khonghucu mengenai pembangunan patung Dewa Kwan Sing Tee Koen.
3. Memberikan gambaran peran ko-eksistensi dan pro-eksistensi antara umat Khonghucu dan Non-Khonghucu dalam keharmonisan antar umat bergama

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun praktis, baik untuk peneliti sendiri maupun peneliti lainnya.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan sosial, khususnya berkaitan dengan pengembangan konsep, teori dan paradigma ilmu politik khususnya dalam politik multikultural. Selain itu diharapkan dapat menyumbangkan fakta lebih rinci,

dalam rangka memberikan koreksi terhadap hasil penelitian atau pemikiran teoritik terdahulu, terutama dalam kaitannya pemikiran Will Kymlicka dalam teori politik multikultural.

1.4.2 Manfaat praktis

Memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menggunakan kaca mata politik multikultural dan memberikan pandangan terhadap masyarakat terkait multikultural dan prulalisme.

1.5 Kerangka konseptual dan Teori

1.5.1 Kerangka Konseptual

1.5.1.1 Politik Identitas

Istilah politik identitas sering disebut juga dengan istilah lain, seperti politik pengakuan dan politik perbedaan atau politik diferensiasi. Secara umum, diskursus tentang politik identitas masuk dalam kajian besar Multikulturalisme. Maka, sebelum membahas apa itu politik identitas, ada baiknya kita memahami dulu kajian multikultural, terutama dalam prespektif variasi dari Ilmu Politik. Dalam buku “*Contemporary Political Theory*”,⁸ Colin Farrelly menjelaskan bahwa, diskursus multikulturalisme belakangan ini muncul secara terang sebagai salah satu variasi dari teori politik. Harus diakui, tidak ada kesepakatan diantara para ilmuwan yang menggeluti wacana multikulturalisme tentang prinsip, tujuan, dan kebijakan terbaik untuk mempromosikan multikulturalisme. Meskipun demikian, perhatian utama para teoritis multikultural dapat ditarik garis persamaan dalam menolak atau tidak mengamini adanya sebuah homogenitas mayarakat secara luas atau assimilationist thrust (dorongan perpaduan), dan dengan itu menjadikan tendensi untuk berasumsi bahwa hanya terdapat satu yang

⁸ Collin Farrelly, *Contemporary Political Theory*. (Queen’s University, 2004)

cocok, dalam hal kebenaran atau jalan hidup normal untuk memahami struktur arena-arena kehidupan.

Kekhawatiran tentang pemasangan makna multikultural juga dinyatakan oleh Joel S. Kahn dalam buku “Kultur, Multikultur, Postkultural”.⁹ Joel lebih-lebih mempertanyakan dan menganalisis secara kritis pluralisme dan multikulturalisme dalam cakupan pemahaman budaya yang lebih luas. Pada dasarnya, baik pluralisme maupun multikulturalisme adalah refleksi atas kesadaran dan pengakuan terhadap keberagaman budaya. Namun perlu dicatat, pluralisme maupun multikulturalisme yang bergerak hingga tahapan ekstrem, dengan asumsi setiap kebudayaan yang berbeda tidak bisa disatukan atau diharmoniskan, maka tidak terelakkan akan muncul rasisme. Rasisme dalam pengertian ini merujuk pada kondisi individu atau kelompok yang meneguhkan kebudayaan atau identitasnya sendiri dan tidak mengakui yang lain secara ekstrem dan vulgar. Fenomena seperti bagaimana congkaknya Hitler menjadi potret jelas bagaimana rasisme dengan meneguhkan identitas ras tertentu secara ekstrem yang akhirnya membedakan secara kejam rasnya dengan ras atau kebudayaan lain.

Dari uraian singkat tersebut, penulis menangkap beberapa poin penting untuk masuk memahami bagaimana realitas multikultural dalam perspektif politik. Pertama, para teoritis multikultural menolak adanya homogenitas di dalam suatu kebudayaan tertentu. Dibelahan wilayah manapun di dunia, terutama pengaruh dari kehidupan modern, hampir tidak ditemui adanya kebudayaan tunggal yang hidup, pasti di dalam masyarakat tersebut, ada kebudayaan lain yang ikut, meskipun kurang mendapat pengakuan di masyarakat. Kedua, meskipun keberagaman di dalam suatu masyarakat itu nyata, namun pada titik tertentu, kebudayaan dominan bisa memaksakan pemahaman dan nilai-nilainya secara penuh. Sehingga, kebudayaan-kebudayaan minor kerap kali tidak mendapat tempat atau pengakuan. Di sini muncul perdebatan bagaimana harusnya budaya dominan menyikapi budaya minoritas lain yang tumbuh di masyarakat.

⁹ Joel S. Kahn, *Kultur, Multikultur dan Postkultural*. (Sage Publication, 1995)

Multikulturalisme itu bukan berbicara tentang perbedaan atau identitas yang saling berbeda, tapi tentang bagaimana merangkul dan menjaga kelestarian budaya, hal ini menjadi inti secara keyakinan dan praktis di dalam term dimana sekelompok orang dapat memahami diri mereka sendiri dan dunia, dan mengorganisir diri mereka sendiri dan hidup bersama. Multikulturalisme menyebarkan sebuah pendirian bahwa pluralitas kultural harus menonjolkan gambaran bagaimana kita berada secara kolektif sebagai masyarakat untuk hidup bersama.¹⁰

1.5.1.2 Etnisitas

Istilah etnik atau yang diterjemahkan ke dalam istilah suku-bangsa, berasal dari perkataan Yunani *eovikos* yang artinya heathen, yaitu penyembah berhala atau sebutan bagi orang yang tidak ber-Tuhan. Sementara itu, istilah itu sendiri dalam bahasa Yunani berasal dari akar kata *eovos* ('ethnos') yang diterjemahkan sebagai nation atau bangsa, yaitu suatu istilah yang lazim dipakai untuk menunjuk pada bangsa-bangsa yang bukan Israel. Dengan kata lain, menurut *the Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles*, ada dua pengertian yang terkandung dalam istilah *ethnic*, (a) menunjuk kepada bangsa-bangsa yang non Kristian atau non Yahudi dan (b) menunjuk kepada bangsa yang masih menyembah berhala. Dalam pengertian berikutnya, istilah *ethnic* dikenal luas setelah dipakai secara resmi oleh suatu *Ethnological Society*, yaitu suatu lembaga yang didirikan di Landon pada 1843, Seterusnya tahun 1848 di Paris ditubuhkan pula institusi serupa yaitu *Societe Ethnologique de Paris*. Di New York institusi serupa juga sudah ada sejak 1842 yang dipanggil *American Ethnological Society*.

Merujuk Llyod Warner dalam tulisan Brian M. Du Toit et all (1978:3) dijelaskan bahwa yang terkandung dalam pengertian *ethnic* menunjuk pada individu-individu guna mempertimbangkan di manakah seseorang atau dirinya termasuk atau dimasukan sebagai anggotanya yaitu yang didasarkan atas asas latar

¹⁰ Parekh Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. (Oxford: Oxford University, 2001)

belakang kebudayaan. Dengan demikian istilah etnik cenderung bersifat sosio-kultural daripada yang berkaitan dengan ras. Atas asas itu maka dalam kajian ini istilah etnik lebih disesuaikan dipergunakan.

1.5.2 Kerangka Teoritik

1.5.2.1 Teori Kewargaan Multikultural

Pada dasarnya kewargaan multikultural ini adalah kajian multikultur tentang hak-hak kewarganegaraan, sebagai respons atas kesalahan dan “kegagalan” liberalisme dan juga demokrasi yang diterapkan oleh Barat, yang dinilai telah melakukan kesalahan fatal dengan mengabaikan kelompok-kelompok minoritas bangsa dan etnis di dalam satu negara atau bangsa mayoritas dan di tengah pluralitas kebudayaan yang ada. Masalah tentang kewargaan minoritas ini, sebenarnya, bukan saja menjadi persoalan di negara liberal sendiri, tetapi juga menjadi tantangan dalam tradisi sosialis. Umumnya realitas yang terjadi adalah “dominasi budaya mayoritas” terhadap minoritas.¹¹

Kelompok-kelompok mayoritas yang menduduki dunia baru seringkali punya klaim homogen, bahwa negara-negara dunia baru, seperti Amerika, Brazil, Selandia Baru, merupakan negara imigran murni yang tanpa memiliki minoritas bangsa. Ini tentu menyakitkan dan mengabaikan sejarah penduduk pribumi. Pertentangan yang menonjol adalah antara tuntutan “Identitas Nasional” dalam federalisme atau sistem politik negara bangsa Amerika, Inggris, di satu sisi, tetapi mengorbankan identitas partikular bangsa yang sebenarnya adalah Dunia Tua penduduk pribumi, yang turun temurun menduduki lahan, akan tetapi diabaikan hak-haknya justru oleh pendatang baru yang berkuasa secara dominan. Anehnya, tuntutan hak-hak atas eksistensi dan penjaminan minoritas bangsa dan etnis dianggap mengancam keutuhan dan stabilitas kesatuan federasi. Atas nama stabilitas negara, minoritas diabaikan, dan pengabaian minoritas bangsa yang berujung pada segregasi dan tidak pernah mengakui hak-hak bangsa serta tidak

¹¹ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*: (Jakarta: LP3ES, 2002) hal. 13

ada pengakuan budaya dan politik. Dengan itu, demokrasi Barat dianggap gagal menangani persoalan minoritas.¹²

Dalam konteks pemecahan masalah ini, Kymlicka memperjuangkan tiga macam hak kolektif bangsa dan etnis minoritas: 1) Hak pemerintahan sendiri bagi minoritas bangsa agar menarik batas wilayah teritorial sehingga menjadi unit pemerintahan mandiri di sana dan menjadi mayoritas. Pengakuan terhadap minoritas, baginya, belum cukup hanya pada hak-hak politik personal dan individual (tindakan afirmatif dan HAM) tetapi juga harus sampai pada pengakuan hukum dan konstitusional. 2) Hak polietnis, mengenai kebebasan untuk mengekspresikan unsur-unsur budayanya yang khas tanpa harus mengganggu stabilitas ekonomi dan politik mayoritas. Yang utama adalah hak akan pengecualian dari undang-undang yang penerapannya merugikan kelompok etnis itu, seperti bahasa, gaya hidup, agama dan lain sebagainya. 3) Hak perwakilan khusus, yang lebih difungsikan untuk membuka kran keterwakilan atau representasi bagi pihak-pihak atau kelompok etnis tertentu yang secara historis dirugikan. Hal ini misalnya terjadi pada kaum difabel, kaum miskin, dan jompo, agar mereka juga terwakili dan mendapat aspirasi yang memadai. Keterwakilan perempuan, misalnya, juga menjadi perhatian khusus dalam hal ini.¹³

1. Hak atas pemerintahan sendiri

Sudah menjadi kelaziman dalam tradisi Liberalisme yang sudah dikembangkan di Barat, bahwa kekuasaan atas kolektivitas masyarakat diberikan kepada mayoritas yang diikat melalui keyakinan tertentu yang diyakini oleh seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini yang mendasari kepemimpinan oleh mayoritas. Dalam risalah khususnya tentang kondisi kebebasan (*The Constitution of Liberalisme*), F.A. Hayek memberikan dasar pemikiran ini. Ia mengatakan bahwa “kewenangan untuk membuat keputusan demokratis terletak pada

¹² *Ibid* hal. 31

¹³ *Ibid* hal. 41

kenyataan bahwa keputusan itu dibuat oleh mayoritas dari masyarakat yang diikat oleh keyakinan tertentu yang diyakini hampir semua anggota masyarakat. Penerimaan prinsip-prinsip bersama itulah yang membuat kumpulan orang menjadi sebuah masyarakat".¹⁴

Namun demikian, seiring dengan pengalaman federalisme yang diterapkan di negara-negara modern, khususnya Amerika, warisan klasik tersebut sudah tidak bisa dipertahankan. Banyak hal-hal yang pada akhirnya mengacaukan pandangan individu dan kelompok sehingga meninggalkan prinsip bersama. Berbagai kesalahan serius yang ditemukan dalam asumsi-asumsi demokrasi yang berbasis pada kontrak sosial yang dalam praktek tidak banyak menjamin keadilan dan melindungi kaum minoritas yang kalah dalam kontrak dan menjamin kesetaraan. Mill, sebagai tokoh utama utilitarianisme menjadi teoritikus liberal yang banyak dipersalahkan dalam hal ini karena gagal dalam mempertahankan secara filosofis hak minoritas.¹⁵ Meski Mill turut memperjuangkan penolakan tirani mayoritas, tapi mayoritas selalu memiliki strategi untuk mempertahankan kemenangan demi kemenangan. Pada akhirnya, soal kepentingan minoritas selalu menjadi dilema.¹⁶

Kymlicka dalam hal ini memberikan dukungan kepada model kebebasan yang memungkinkan kelompok bangsa dalam sistem demokrasi federal untuk menikmati menjadi mayoritas. Jalan pertama yang lazim bagi misi mulia ini adalah menjamin hak-hak kemerdekaan kaum minoritas bangsa. Mekanisme yang dijalankan adalah dengan membagi-bagi kekuasaan antara pemerintahan pusat dan sub-sub regional.¹⁷ Dengan kata lain, Kymlicka ingin menarik hak atas kemandirian bangsa dalam bingkai federalisme di dalam iklim demokrasi liberal.

¹⁴ Eugene F. Miller, *Kondisi Kebebasan: Liberalisme Klasik* F.A. Hayek, Lela E. Madjiah (penj.), (Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung, 2012), hal. 66

¹⁵ Karen Lebacqz. *Teori-Teori Keadilan: Six Theories of Justice: Suplemen: Konsep Keadilan dalam Kristen* oleh Hans Kelsen, Yudi Santoso (penj.) (Bandung: Nusamedia, 2011) hal: 5

¹⁶ Jonathan Wolff. *Pengantar Filsafat Politik*, M Nur Prabowo S. (penj.), (Bandung: Nusamedia, 2013) hal. 163

¹⁷ Kymlicka, *Kewargaan Multikultural: (Jakarta: LP3ES, 2002)* hal. 40

2. Hak atas polietnisitas

Salah satu kepentingan komunal yang fundamental, di samping kepentingan kebangsaan, adalah kepentingan unsur-unsur polietnisitas. Kepentingan ini penting untuk diberikan kepada komunitas etnis baik yang berbasis suku, agama, ras ataupun golongan. Hak polientnis ini dibutuhkan untuk melindungi setiap kelompok etnis agar dapat mengekspresikan seni dan kebudayaan mereka, ritual keagamaan mereka, atau, yang terpenting, bahasa asli mereka. Kmlicka menolak salah satu bentuk strategi yang dominan dalam hal bahasa dalam bentuk konformitas inggris.¹⁸

Contoh dilematis terkait hak polietnis yang paling kontroversial, di samping bahasa, adalah hak ekspresi keagamaan. Kasus ini sering dialami oleh penganut agama di Eropa dan menjadi etnis minor. Misalnya orang-orang muslimah di Perancis atau di Inggris dilarang memakai kerudung sebagai identitas etnis dan sebagai kewajiban agama mereka. Sudah semestinya hak-hak polietnis seperti ini dijamin bagi setiap anggota etnis secara permanen. Di samping upaya ini dapat menjamin kebebasan etnis juga memberikan keuntungan tersendiri bagi promosi integrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar, bukan pemerintahan sendiri.¹⁹

Menariknya, salah satu pembelaan yang dipakai oleh Kylicka adalah pembelaan historis-eksistensial yang cukup signifikan. Dalam bukunya di Bab kelima Kymlicka melakukan pembelaannya dengan menggali peran budaya (identitas kultural) peran budaya di dalam teori liberal demokratik. Menurutnya, kebebasan memilih sebagai hak mendasar individul dalam liberalisme amat bergantung pada hadirnya kebudayaan masyarakat, yang ditentukan oleh bahasa dan sejarah, dan kebanyakan masyarakat mempunyai ikatan yang erat dengan kebudayaannya sendiri.²⁰

¹⁸ *Ibid* hal 45

¹⁹ *Ibid* hal. 47

²⁰ *Ibid* hal. 112

3. Hak atas representasi atau keterwakilan

Menurut Kymlicka, di seluruh demokrasi Barat, muncul keprihatinan yang meningkat bahwa proses politik “kurang terwakili” mengancam, dalam arti bahwa proses tersebut gagal mencerminkan keragaman etnisitas dan kebangsaan penduduk. Para anggota legislatif di negara-negara Barat tersebut didominasi oleh kalangan menengah, tidak cacat, dan berkulit putih. Oleh karena itu, proses “yang lebih mewakili” atau “yang lebih representatif” adalah proses yang menyertakan anggota dari minoritas etnis dan ras perempuan, orang miskin, para penyandang cacat, dan lain sebagainya.²¹ Pandangan ini cocok dengan kebijakan tindakan afirmatif yang banyak disuarakan bagi kepentingan kaum minoritas yang kurang beruntung.

Demikian tiga macam hak komunal utama yang diperjuangkan oleh Kymlicka. Dalam perkembangannya hak-hak minoritas bangsa tersebut justru dirasa sangat penting bagi stabilitas negara. Beberapa aspek pokok yang menjadi pertimbangan utama terkait hak pemerintahan sendiri dan hak polietnis adalah masalah agraria atau tanah (yang seringkali menjadi sumber konflik), kesehatan, pendidikan, konstitusi, hukum perdata, pidana, pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya. Meski tidak mutlak terpenuhi, tetapi beberapa aspek dari tuntutan hak-hak minoritas itu kini semakin berpengaruh di negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia yang telah menerapkan sistem otonomi daerah, meski tidak sampai pada separatisme ekstrim. Konteks pembicaraan tentang Kymlicka tentu adalah federalisme Amerika. Tapi dari ketiga hak komunal yang diperkenalkan Kymlicka tersebut, hak yang cukup banyak bersentuhan dengan fenomena dan budaya demokrasi di Indonesia adalah hak atas polietnisitas. Terkait hak-hak polietnik, pada dasarnya pertentangan yang signifikan dan menjadi sorotan dalam proses demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini justru terkait hubungan etnis.

²¹ *Ibid* hal. 47

1.5.2.2 Ko-eksistensi dan Pro-eksistensi

- **Ko-eksistensi**

Gagasan pluralisme agama adalah membangun keharmonisan, hidup berdampingan (ko-eksistensi) dengan penuh kedamaian dan toleransi antar keyakinan keagamaan yang beragam dan terkadang saling bertentangan. Dalam hal ini, ko-eksistensi damai (*peaceful coexistence*) merupakan prinsip moral paling penting. Dalam *Cambridge Dictionary of American English*, ko-eksistensi didefinisikan sebagai “hidup atau berada bersama secara damai pada saat atau tempat yang sama.”²² Secara serupa *The American Heritage Dictionary* mendefinisikannya sebagai (1) “berada bersama pada saat yang sama atau di tempat yang sama”; (2) “hidup damai dengan yang lain sekalipun terdapat perbedaan terutama karena masalah kebijakan.”²³

Ko-eksistensi terjadi, kata teoritis politik Michael Walzer, ketika sekelompok masyarakat dengan sejarah, budaya, dan identitas yang berbeda, hidup bersama secara damai.²⁴ Menurut Mufti Besar Suriah, Sheikh Ahmad Muhammad Amin Kufaro dalam Konferensi Hubungan Muslim-Kristen pada 1987 di Malta “ko-eksistensi membutuhkan dua pihak atau lebih yang ingin hidup bersama secara damai, tanpa perselisihan, pertengkaran atau konflik”. Sejarahwan Bernard Lewis, ketika membahas sejarah dan kompleksitas hubungan Islam-Barat modern, menulis bahwa “ko-eksistensi dalam dunia kontemporer di berbagai tingkat — nasional, rasial, sosial, ideologi, dan agama — menyiratkan keinginan untuk hidup damai dan saling menghormati satu sama lain. Menurutnya, ko-eksistensi pragmatis, idealnya, menjadi hak kesetaraan inheren di antara kelompok masyarakat politik yang berbeda.”²⁵ Laporan Ko-eksistensi

²² Aaron Tyler, *Islam, The West, and Tolerance, Conceiving Coexistence* (New York: Palgrave Macmillan, 2008), hal. 4.

²³ Lihat, "coexistence", dikunjungi pada 21 Mei 2020, <http://www.thefreedictionary.com/coexistence>

²⁴ Michael Walzer, *On Toleration, Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics* (New Haven and London: Yale University Press, 1997), hal. 2.

²⁵ *Op. Cit*, hal. 4-5.

International (*Coexistence International Report*) pada 2006 secara ringkas merumuskan ko-eksistensi sebagai: “*Sebuah konsep yang meliputi berbagai upaya di semua lapisan masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada, ketika kelompok (budaya dan agama) yang berbeda berusaha hidup bersama*”. Praktek ko-eksistensi bertujuan mengubah hubungan sosial politik, struktur dan wacana, dalam rangka meminimalisasi kekerasan dan konflik struktural. Di dalamnya, individu, kelompok dan lembaga dituntut mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola secara konstruktif konflik yang muncul tanpa kekerasan, kesabaran, kerendahan hati, moderasi, dan kehati-hatian merupakan hal yang dibutuhkan.²⁶

Dengan demikian, sebagai prinsip moral pluralisme, toleransi dan ko-eksistensi tidaklah pasif. Pluralisme, kata Fathi Osman, lebih dari sekedar toleransi moral atau ko-eksistensi pasif—yakni, toleransi yang terkait dengan persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi; ko-eksistensi yang semata-mata perkara penerimaan atas pihak lain untuk sekadar tidak terjadi konflik. Karenanya, pluralisme mestinya mensyaratkan kelembagaan dan legal yang melindungi dan menjamin kesetaraan, mengembangkan persaudaraan, serta menuntut pendekatan serius dalam upaya memahami pihak lain dan kerja sama demi kebaikan semua.²⁷ Dengan kata lain, pluralisme mestinya melahirkan ko-eksistensi produktif melalui kerja intelektual dan kemanusiaan dalam membangun peradaban dan kebajikan semesta (*rahmatan li al-‘a lamin*).

- **Pro-eksistensi**

Lebih jauh lagi, tahap akhir dari seluruh proses keterbukaan agama yaitu tahap yang disebut dengan pro-eksistensi, artinya tahap ini adalah tahap di mana agama-agama itu ada bukan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk saling ada, melainkan ada untuk keberadaan dan kehidupan bersama. Kata kunci dalam pro-

²⁶ *Op. Cit.*

²⁷ Mohammed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme Dan Toleransi Keagamaan: Pandangan Al-Quran, Kemanusiaan, Sejarah Dan Peradaban*, trans. Irfan Abubakar, edisi digital (Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, t.t.), 2-3.

eksistensi adalah kata "hidup" dan semua turunannya. Hidup dan kehidupan itu adalah terberi (*given*) dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia atau makhluk lain. Untuk itu, semua tindakan yang melawan hidup dan kehidupan adalah tindakan yang melawan pemberi hidup dan kehidupan itu adalah Tuhan. Jadi pro-eksistensi adalah keadaan dan kegiatan yang menyambut pemberian Tuhan itu dengan penghargaan yang sama nilainya dengan hidup dan kehidupan itu sendiri. Dalam pro-eksistensi semua kemampuan manusia dan alam diberlakukan. Dengan pro-eksistensi ini setiap semua umat beragama menemukan dasar dan motivasi yang kokoh untuk saling mendekatkan diri satu kepada yang lain, bahkan juga membangun persaudaraan yang sejati.²⁸ Pro-eksistensi artinya tahap ini adalah tahap di mana para pemeluk agama masing-masing mengakui bahwa mereka dan agama mereka ada bukan hanya untuk diri masing-masing mereka sendiri atau untuk saling ada, melainkan untuk keberadaan dan kehidupan bersama. Pada tahap pro-eksistensi atau keterbukaan antar agama, agama tidak lagi bersifat eksklusif. Agama bersifat inklusif dan mau menerima kehadiran agama-agama yang lain. Lebih luas lagi pro-eksistensi meliputi toleransi, solidaritas, kerukunan, serta saling menghargai agama satu terhadap yang lain. Dengan pro-eksistensi ini setiap dan semua umat beragama menemukan motivasi yang kokoh untuk saling mendekatkan diri satu kepada yang lain, bahkan juga membangun persaudaraan yang sejati. Pro-eksistensi yang dimaksud ialah yang membawa kebersamaan sedikitnya kepada dua arah, yaitu ke dalam diri agama-agama itu sendiri dan ke tujuan yang lebih menyeluruh dari adanya agama-agama itu.

1.6 Metode dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Definisi dari metodologi kualitatif itu sendiri adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, (lawannya adalah eksperimen)

²⁸ S. Wismoady Wahono, *Pro-Eksistensi Kehidupan*. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia. 2001) hal. 5-11

dimana peneliti merupakan instrument kunci.²⁹ Dari pernyataan tersebut diketahui bahwasannya dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti merupakan instrument utama dalam pengumpulan data, yang tujuannya yakni bukan untuk memahami realita tunggal, namun realita majemuk sehingga pada pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.³⁰

Terkait dengan penelitian “Politik Multikultural Dalam Pembangunan Patung Dewa Kwan Sing tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban” ini selain mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan dari kaca mata politik multikultural dan bagaimana pandangan masyarakat Tuban mengenai fenomena multikultural ini. Unit analisisnya pada beberapa subjek, dikarenakan subjek yang dipilih yakni yang memiliki kaitan dengan topik dan yang pasti jelas dalam memberikan info yang diberikan itu akurat dan terpercaya, dan mempermudah peneliti untuk menganalisisnya dan mewawancari informan yang dianggap layak oleh peneliti. Sehingga data yang diperoleh menjadi kaya dan menjadi valid.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dianggap cukup relevan untuk menggambarkan realitas-realitas yang terjadi beriringan dengan perencanaan pembangunan politik multikultural tersebut, sehingga peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendeskripsikan situasi perencanaan politik dibalik fenomena-fenomena yang ada. Dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan secara mendalam kepada subjek yang berkaitan, akan dirasa cukup untuk menggali informasi atau data dari subjek penelitian yang dipilih.

1.6.1 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif yang merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian memiliki hasil berupa data-data baik lisan maupun tertulis serta respon dan tingkah laku dari narasumber sebagai salah satu upaya mendapatkan pengertian tentang makna dibalik

²⁹ Afifudin dan Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV.Pustaka Setia. Hal.57

³⁰ Pitilima, Hamid Pitilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

fenomena yang terjadi secara detail. Dari sini dapat dijelaskan bahwa kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang terjadi. Sehingga dalam politik perencanaan sebuah pembangunan kota akan selalu tercipta potensi kerasionalan politiknya pada masing-masing kelompok maupun individu dalam merumuskan suatu kebijakan. Maka lewat data politik yang diperoleh beserta fakta yang ditemukan akan dimaksimalkan dalam penguraiannya.

Berdasarkan judul penelitian “Politik Multikultural Dalam Pembangunan Patung Dewa Kwan Sing tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban” maka tentunya penelitian difokuskan pada politik multikultural di dalam pembangunan patung tersebut yang mana akan ada dinamika politik identitas dalam persepsi masyarakat Tuban umat Khonghucu dan non Khonghucu yang masing-masing membawa kepentingannya. fokus penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan yang nantinya membantu peneliti agar terfokus pada lingkup studi yang telah ditentukan. Peneliti memfokuskan pada 4 aktor besar yang memiliki keterkaitan dalam politik multikultural terkait perencanaan pembangunan patung tersebut, diantaranya, Sekretaris Daerah Kabupaten, Yayasan Kwan Sing Bio, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat sekitar Klenteng Kwan Sing Bio dengan melihat kepentingan serta relasi dan interaksi masing-masing aktor di dalam politik perencanaan sebuah pembangunan. Serta aktor pendukung berjalannya kebijakan antara lain dinas-dinas yang terkait.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Tuban, khususnya di sekitar Klenteng Kwan Sing Bio, kantor-kantor Pemerintahan, kantor Yayasan Kwan Sing Bio, dll. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena peneliti melihat bahwasannya ada fenomena multikultural, sehingga dapat ditarik kesimpulan jika

politik multikultural dalam pembangunan patung tersebut bisa diterima masyarakat dan bagaimana pemerintahan lokal memandang permasalahan ini.

1.6.3 Subjek Penelitian

Berkaitan dengan penelitian mengenai politik perencanaan pembangunan kota, maka subjek yang dibutuhkan adalah informan ataupun narasumber yang mampu atau memahami dan mengetahui tentang perencanaan pembangunan kota di wilayah tersebut. Informan pendukung atau lainnya juga dibutuhkan untuk mendukung atau menyokong serta memperjelas kevalidan data yang ada, seperti tokoh agama, dan aliansi masyarakat yang mampu menjadi penunjang kelengkapan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi-informasi terkait keadaan saat ini serta menyimpulkan secara rasional dengan faktor-faktor yang ada. Wawancara sendiri merupakan proses untuk mendapatkan keterangan dalam mencapai tujuan penelitian dengan cara tanya jawab serta tatap muka antara pewawancara dengan responden guna mendapatkan data berupa keterangan lisan dari narasumber. Maka dari itu dilakukan wawancara sistematis yang terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara tertulis yang berisi tentang apa saja yang hendak ditanyakan pada responden.

1.6.4 Penentuan Informan

NARASUMBER	UNIT ANALISIS	JABATAN
Informan G	Sebagai pihak yang menginisiasi pembangunan patung tersebut.	Ketua Yayasan Klenteng
Informan P	Sebagai pihak yang mengajarkan ajaran Khonghucu	Pemuka Agama

Informan HT	Sebagai perwakilan umat Konghucu yang berwawasan kebangsaan	Umat Konghucu, mantan pengurus dan kader partai politik
Informan F dan C	Sebagai pihak yang ikut andil dalam fenomena politik multikultural	Pemuda dan masyarakat sekitar
Informan AH	Sebagai perwakilan umat beragama Non Khonghucu	Pemuka Agama

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dikumpulkan agar dapat di analisis lebih lanjut, adapun teknik pengumpulan data ini antara lain:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan keadaan sekitar objek yang diamati dengan menggunakan panca indera. Hal ini bertujuan untuk menghimpun data yang diperoleh dari segi akurasi data.

b. Wawancara

Wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk memperoleh data primer. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dan dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian di lapangan yang berupa jawaban dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan berkembang kepada pihak-pihak yang terkait politik multikultural dalam pembangunan patung tersebut. Data primer dikumpulkan dengan metode riset observasi dan wawancara mendalam. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data sekunder yang didapat dari DPRD, Kantor Pemerintahan, dll.

c. Dokumentasi

Metode ini untuk mengumpulkan data dan menelusuri data historis. Hal ini sangat membantu penelitian karena adapun fakta-fakta yang ada tersimpan dalam bentuk dokumen (surat-surat, laporan, catatan, dll). Sehingga data tersebut tidak terbatas pada ruang dan waktu yang dapat memberi peluang kepada peneliti agar mengetahui berbagai hal yang telah terjadi pada waktu yang lalu-lalu.

I.6.6 Teknik Analisis Data

Langkah analisis data tujuannya untuk mencari data hasil temuan di lapangan dan kemudian data tersebut di data lalu di pilah-pilah sebagai informasi pendukung dalam penelitian. Analisis ini dilakukan lewat mengkaji data yang terkumpul lewat wawancara yang kemudian di transkripsikan. Hasil yang di dapat saat wawancara ini kemudian dibaca dan di analisis agar mendapatkan gambaran umum yang kemudian di gabungkan dengan data tambahan yang di peroleh agar satu sama lain dapat berkaitan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan, dipilah-pilah, dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori, kemudian diberi makna untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah penelitian.